



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan program-program prioritas Wali Kota perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian kembali anggaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa pelaksanaan realokasi anggaran berdampak pada besaran nilai Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah di atur dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

| | |
|------------------|--|
| PERANGKAT DAERAH | |
| KABANG HUKUM | |
| ASISTEN | |
| SEKDA | |

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.

| | |
|------------------|--|
| PERANGKAT DAERAH | |
| KABAG HUKUM | |
| ASISTEN | |
| SEKDA | |

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu (1) ayat yakni ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan/atau tanggal yang ditentukan BUD terkait ketersediaan dana di Kas Daerah.
- (2) Apabila pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan bertepatan dengan hari libur, pembayaran TPP dilakukan pada hari kerja setelah hari libur.
- (3) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan surat permintaan pembayaran ke Badan Keuangan Kota Gorontalo setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan bukti print out rekapitulasi nilai produktivitas kerja dan rekapitulasi nilai disiplin yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.
- (4a) Pembayaran TPP Bulan Desember, paling cepat dibayarkan tanggal 26 (dua puluh enam) bulan berkenaan.
- (5) Format dokumen pendukung pembayaran TPP tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

| | |
|------------------|--|
| PERANGKAT DAERAH | |
| KASAB HUKUM | |
| ASISTEN | |
| SEKDA | |

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah/unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, pengaturan jam kerja sebagai berikut :
- masuk pukul 08.00 Wita, dan
 - pulang pukul 16.00 Wita berlaku untuk hari senin, hari selasa, hari rabu dan hari kamis.
 - pulang pukul 16.30 Wita untuk hari jumat.
- (2) Perangkat Daerah /unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, pengaturan jam kerja sebagai berikut :
- masuk pukul 08.00 Wita.
 - pulang pukul 15.30 Wita berlaku untuk hari senin, hari selasa, hari rabu dan hari kamis
 - pulang pukul 11.30 Wita untuk hari jumat, dan
 - pulang pukul 14.30 Wita untuk hari sabtu.
- (3) Perangkat Daerah/unit kerja yang menerapkan shif kerja, dapat menyampaikan jadwal shif ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo untuk disesuaikan dengan mesin daftar hadir elektronik perangkat daerah/unit kerja terkait.
3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor 5), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

| | |
|---------------------|--|
| PERANGKAT DAERAH | |
| KABAG HUKUM | |
| ASISTEN | |
| SEKDA | |

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Oktober 2025

WALI KOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA

Diundangkan Gorontalo
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 26

| | |
|------------------|--|
| PERANGKAT DAERAH | |
| KABAG HUKUM | |
| ASISTEN | |
| SEKDA | |



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH

| NO | UNIT KERJA | SUB UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|--------------------|---|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | SEKERTARIAT DAERAH | SEKERTARIAT DAERAH | PIMPINAN TINGGI | 15 | Rp 23,448,003 |
| 2 | SEKERTARIAT DAERAH | SEKERTARIAT DAERAH | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 12,732,403 |
| 3 | SEKERTARIAT DAERAH | SEKERTARIAT DAERAH | PIMPINAN TINGGI | 13 | Rp 9,046,316 |
| 4 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 9,212,921 |
| 5 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN HUKUM | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 8,571,038 |
| 6 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN UMUM | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 8,571,038 |
| 7 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PEMERINTAHAN | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 8,420,006 |
| 8 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 8,420,006 |
| 9 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ORGANISASI | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 8,420,006 |
| 10 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 8,420,006 |
| 11 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 8,420,006 |
| 12 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 8,420,006 |
| 13 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 5,376,748 |
| 14 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 5,376,748 |
| 15 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | FUNGSIONAL | 9 | Rp 5,376,748 |
| 16 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 4,025,824 |
| 17 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN HUKUM | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 4,025,824 |
| 18 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN UMUM | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 4,025,824 |
| 19 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PEMERINTAHAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 4,025,824 |
| 20 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 4,025,824 |
| 21 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ORGANISASI | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 4,025,824 |
| 22 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 4,025,824 |
| 23 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 4,025,824 |
| 24 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 4,025,824 |
| 25 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | FUNGSIONAL | 8 | Rp 5,376,403 |
| 26 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 5,038,381 |
| 27 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,983,836 |
| 28 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN HUKUM | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,983,836 |
| 29 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 5,376,179 |
| 30 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 3,744,373 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|---|--------------------------|---|----|-----------|
| 29 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp | 1,706,177 |
| 30 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN HUKUM | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp | 1,706,177 |
| 31 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN UMUM | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp | 1,706,177 |
| 32 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PEMERINTAHAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp | 1,706,177 |
| 33 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp | 1,706,177 |
| 34 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ORGANISASI | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp | 1,706,177 |
| 35 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp | 1,706,177 |
| 36 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp | 1,706,177 |
| 37 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp | 1,706,177 |
| 38 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp | 1,605,068 |
| 39 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN HUKUM | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp | 1,605,068 |
| 40 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN UMUM | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp | 1,605,068 |
| 41 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PEMERINTAHAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp | 1,605,068 |
| 42 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp | 1,605,068 |
| 43 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ORGANISASI | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp | 1,605,068 |
| 44 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp | 1,605,068 |
| 45 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp | 1,605,068 |
| 46 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp | 1,605,068 |
| 47 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp | 1,600,622 |
| 48 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN HUKUM | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp | 1,600,622 |
| 49 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN UMUM | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp | 1,600,622 |
| 50 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PEMERINTAHAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp | 1,600,622 |
| 51 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp | 1,600,622 |
| 52 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ORGANISASI | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp | 1,600,622 |
| 53 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp | 1,600,622 |
| 54 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp | 1,600,622 |
| 55 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp | 1,600,622 |
| 56 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp | 1,211,018 |
| 57 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN HUKUM | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp | 1,211,018 |
| 58 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN UMUM | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp | 1,211,018 |
| 59 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PEMERINTAHAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp | 1,211,018 |
| 60 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp | 1,211,018 |
| 61 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ORGANISASI | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp | 1,211,018 |
| 62 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp | 1,211,018 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|--|--------------------------|---|----|-----------|
| 63 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp | 1,211,018 |
| 64 | SEKERTARIAT DAERAH | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp | 1,211,018 |

WALI KOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.1

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025


TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

SEKRETARIAT DPRD

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|------------------|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | SEKERTARIAT DPRD | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,008 |
| 2 | SEKERTARIAT DPRD | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 6,801,632 |
| 3 | SEKERTARIAT DPRD | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,059,237 |
| 4 | SEKERTARIAT DPRD | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,059,237 |
| 5 | SEKERTARIAT DPRD | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,050,688 |
| 6 | SEKERTARIAT DPRD | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,050,688 |
| 7 | SEKERTARIAT DPRD | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 8 | SEKERTARIAT DPRD | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,863 |
| 9 | SEKERTARIAT DPRD | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,692 |
| 10 | SEKERTARIAT DPRD | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp 1,211,018 |

WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.2

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|--|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 13,160,525 |
| 2 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 6,449,045 |
| 3 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | FUNGSIONAL | 11 | Rp 4,371,727 |
| 4 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 6,042,652 |
| 5 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | FUNGSIONAL | 9 | Rp 4,316,065 |
| 6 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 4,316,065 |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 4,316,065 |
| 8 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | FUNGSIONAL | 9 | Rp 4,316,065 |
| 9 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | FUNGSIONAL | 8 | Rp 2,616,713 |
| 10 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 2,504,480 |
| 11 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 2,149,159 |
| 12 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 2,149,159 |
| 13 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 2,041,898 |
| 14 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp 1,211,018 |

WALI KOTA GORONTALO, A



ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.3

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025


TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BADAN KEUANGAN

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|----------------|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | BADAN KEUANGAN | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 13,626,828 |
| 2 | BADAN KEUANGAN | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 6,720,902 |
| 3 | BADAN KEUANGAN | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 6,399,373 |
| 4 | BADAN KEUANGAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 4,779,920 |
| 5 | BADAN KEUANGAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 4,779,920 |
| 6 | BADAN KEUANGAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 4,638,554 |
| 7 | BADAN KEUANGAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 2,604,182 |
| 8 | BADAN KEUANGAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 2,176,364 |
| 9 | BADAN KEUANGAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 2,041,898 |

WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.4

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|---|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 13,626,828 |
| 2 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 6,569,870 |
| 3 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 6,188,610 |
| 4 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 6,071,844 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 4,373,494 |
| 6 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 4,317,598 |
| 7 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 4,317,598 |
| 8 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 4,317,598 |
| 9 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 2,520,132 |
| 10 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 2,149,159 |
| 11 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 2,041,898 |

WALI KOTA GORONTALO,

ADHAMI DAMBEA

LAMPIRAN I.5

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|---|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,009 |
| 2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,327,635 |
| 3 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,250,290 |
| 4 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 5 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 6 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |


WALI KOTA GORONTALO
ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.6
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PERJABAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|-----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,009 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,327,636 |
| 3 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,250,306 |
| 4 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 5 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 6 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 8 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 9 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.7

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PERHUBUNGAN

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|-------------------|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DINAS PERHUBUNGAN | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,009 |
| 2 | DINAS PERHUBUNGAN | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,384,273 |
| 3 | DINAS PERHUBUNGAN | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,489,662 |
| 4 | DINAS PERHUBUNGAN | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,437,117 |
| 5 | DINAS PERHUBUNGAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 6 | DINAS PERHUBUNGAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 7 | DINAS PERHUBUNGAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 8 | DINAS PERHUBUNGAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 9 | DINAS PERHUBUNGAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 10 | DINAS PERHUBUNGAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 11 | DINAS PERHUBUNGAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO,



ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.8

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,009 |
| 2 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,327,636 |
| 3 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,250,290 |
| 4 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | FUNGSIONAL | 11 | Rp 3,514,663 |
| 5 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 6 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 7 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 8 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 9 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 10 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 11 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.9

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|------------|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DP2KBP3A | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,009 |
| 2 | DP2KBP3A | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,327,636 |
| 3 | DP2KBP3A | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,250,290 |
| 4 | DP2KBP3A | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 5 | DP2KBP3A | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 6 | DP2KBP3A | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 7 | DP2KBP3A | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 8 | DP2KBP3A | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 9 | DP2KBP3A | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 10 | DP2KBP3A | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.10

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

| NO | UNIT KERJA | SUB UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|--|--|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,009 |
| 2 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,384,273 |
| 3 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,489,662 |
| 4 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,332,027 |
| 5 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 6 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 7 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | UPTD | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 8 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 9 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 10 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | UPTD | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 11 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 12 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 13 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | UPTD | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 14 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO

 ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.11

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PENDIDIKAN

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|------------------|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 11,396,026 |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,384,272 |
| 3 | DINAS PENDIDIKAN | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,904,181 |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,437,116 |
| 5 | DINAS PENDIDIKAN | FUNGSIONAL | 11 | Rp 2,503,467 |
| 6 | DINAS PENDIDIKAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,224,899 |
| 7 | DINAS PENDIDIKAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,180,723 |
| 8 | DINAS PENDIDIKAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 9 | DINAS PENDIDIKAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,180,723 |
| 10 | DINAS PENDIDIKAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN | FUNGSIONAL | 9 | Rp 2,127,285 |
| 12 | DINAS PENDIDIKAN | FUNGSIONAL | 8 | Rp 2,023,874 |
| 13 | DINAS PENDIDIKAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 14 | DINAS PENDIDIKAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,863 |
| 15 | DINAS PENDIDIKAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,692 |
| 16 | DINAS PENDIDIKAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp 1,211,018 |

WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.12

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS KESEHATAN

| NO | UNIT KERJA | SUB UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 11,396,027 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | FUNGSIONAL | 14 | Rp 6,076,829 |
| 3 | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT OTANAHA | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,437,134 |
| 4 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,384,273 |
| 5 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | FUNGSIONAL | 12 | Rp 3,624,756 |
| 6 | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA | FUNGSIONAL | 12 | Rp 3,624,756 |
| 7 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,839,960 |
| 7 | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 3,444,603 |
| 8 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,676,407 |
| 9 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | FUNGSIONAL | 11 | Rp 3,444,604 |
| 10 | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA | FUNGSIONAL | 11 | Rp 3,444,603 |
| 11 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | FUNGSIONAL | 10 | Rp 2,691,570 |
| 12 | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA | FUNGSIONAL | 10 | Rp 2,691,570 |
| 13 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,180,723 |
| 14 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 15 | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 16 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,180,726 |
| 17 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 18 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | FUNGSIONAL | 9 | Rp 2,657,230 |
| 19 | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA | FUNGSIONAL | 9 | Rp 2,657,230 |
| 20 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 21 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 22 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | FUNGSIONAL | 8 | Rp 2,627,486 |
| 23 | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA | FUNGSIONAL | 8 | Rp 2,627,486 |
| 24 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 25 | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 26 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | FUNGSIONAL | 7 | Rp 2,426,214 |
| 27 | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA | FUNGSIONAL | 7 | Rp 2,426,214 |
| 28 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |

| | | | | | |
|----|-----------------|---------------------------------|--------------------------|---|--------------|
| 29 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | FUNGSIONAL | 6 | Rp 1,822,705 |
| 30 | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA | FUNGSIONAL | 6 | Rp 1,822,705 |
| 31 | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 32 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KOTA UTARA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 33 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KOTA TENGAH | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 34 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KOTA SELATAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 35 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DUNGINGI | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 36 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIPATANA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 37 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HULONTHALANGI | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 38 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DUMBO RAYA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 39 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | FUNGSIONAL | 6 | Rp 1,822,705 |
| 40 | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA | FUNGSIONAL | 6 | Rp 1,822,705 |
| 41 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |
| 42 | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |
| 43 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KOTA TIMUR | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |
| 44 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KOTA UTARA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |
| 45 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KOTA BARAT | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |
| 46 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KOTA TENGAH | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |
| 47 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KOTA SELATAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |
| 48 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS PILOLODAA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |
| 49 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DUNGINGI | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |
| 50 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIPATANA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |
| 51 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HULONTHALANGI | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |
| 52 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KOTA UTARA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 4 | Rp 1,531,559 |
| 53 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DUNGINGI | ADMINISTRASI - Pelaksana | 4 | Rp 1,531,559 |
| 54 | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIPATANA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 4 | Rp 1,531,559 |
| 55 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 4 | Rp 1,531,559 |
| 56 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp 1,211,018 |
| 57 | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp 1,211,018 |


 WALI KOTA GORONTALO
 ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.13

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO


NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|---------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 11,540,026 |
| 2 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,400,130 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,904,181 |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 5 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 5 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,180,723 |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 7 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 8 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,863 |
| 9 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,692 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp 1,211,018 |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.14

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

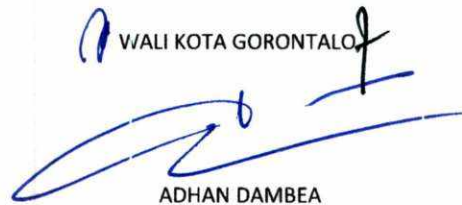
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|---|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,008 |
| 2 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,327,636 |
| 3 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,250,290 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 5 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 6 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 7 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 8 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 9 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,863 |
| 10 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,692 |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.15

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG


PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|----------------------------|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,008 |
| 2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,358,706 |
| 3 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,378,733 |
| 4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | FUNGSIONAL | 11 | Rp 4,378,733 |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,180,723 |
| 6 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,158,634 |
| 7 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,158,634 |
| 8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | FUNGSIONAL | 9 | Rp 2,716,867 |
| 9 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,089,070 |
| 10 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,089,071 |
| 11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | FUNGSIONAL | 8 | Rp 2,591,979 |
| 12 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | FUNGSIONAL | 7 | Rp 2,106,893 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,815,747 |
| 14 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,605,068 |
| 15 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | FUNGSIONAL | 6 | Rp 1,877,114 |
| 16 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,692 |
| 17 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | FUNGSIONAL | 5 | Rp 1,555,268 |
| 18 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp 1,211,018 |

WALI KOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.16

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|-------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,009 |
| 2 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,327,636 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,250,290 |
| 4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 5 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 6 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 9 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 10 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.17

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|--------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,009 |
| 2 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,327,636 |
| 3 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,250,290 |
| 4 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,043,334 |
| 5 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 6 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM | FUNGSIONAL | 9 | Rp 2,657,671 |
| 7 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 8 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 9 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM | FUNGSIONAL | 8 | Rp 2,523,806 |
| 10 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 11 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 12 | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.18

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PANGAN

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|--------------|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DINAS PANGAN | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,009 |
| 2 | DINAS PANGAN | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,327,636 |
| 3 | DINAS PANGAN | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,250,290 |
| 4 | DINAS PANGAN | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,043,334 |
| 5 | DINAS PANGAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 6 | DINAS PANGAN | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 3,028,582 |
| 7 | DINAS PANGAN | FUNGSIONAL PENYETARAAN | 8 | Rp 3,028,582 |
| 8 | DINAS PANGAN | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 7 | Rp 1,697,724 |
| 9 | DINAS PANGAN | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 10 | DINAS PANGAN | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO,



ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.19

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|------------------------|-------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,009 |
| 2 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ADMINISTRASI - Adrninistrator | 12 | Rp 5,327,636 |
| 3 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ADMINISTRASI - Adrninistrator | 11 | Rp 4,495,500 |
| 4 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ADMINISTRASI - Adrninistrator | 11 | Rp 4,250,290 |
| 5 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,043,334 |
| 6 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 7 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 8 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 9 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 11 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |
| 12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp 1,211,018 |


WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.20

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|--|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,009 |
| 2 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,327,636 |
| 3 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,250,290 |
| 4 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 5 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 6 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 7 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 8 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 9 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 10 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |


WALI KOTA GORONTALO,
ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.21
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|---|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,009 |
| 2 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,327,636 |
| 3 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,250,291 |
| 4 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 5 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 6 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 7 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 8 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 9 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 10 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO,

 ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.22
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|---|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,009 |
| 2 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,327,636 |
| 3 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,250,291 |
| 4 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN | FUNGSIONAL | 11 | Rp 3,514,663 |
| 5 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 6 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 7 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN | FUNGSIONAL | 9 | Rp 2,657,671 |
| 8 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 9 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 10 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN | FUNGSIONAL | 8 | Rp 2,523,806 |
| 11 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 12 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 13 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN | FUNGSIONAL | 6 | Rp 2,176,364 |
| 14 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |
| 15 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 3 | Rp 1,211,018 |

WALI KOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.23

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|---|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,009 |
| 2 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,327,636 |
| 3 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,250,291 |
| 4 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 5 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 6 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 7 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 8 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 9 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 10 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.24

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|-------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 10,818,009 |
| 2 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 5,384,273 |
| 3 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,489,661 |
| 4 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 4,332,027 |
| 5 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,043,334 |
| 6 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 9 | Rp 3,043,334 |
| 7 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | FUNGSIONAL | 9 | Rp 2,657,671 |
| 8 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | ADMINISTRASI - Pengawas | 8 | Rp 3,028,582 |
| 9 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | FUNGSIONAL - Penyetaraan | 8 | Rp 3,028,582 |
| 10 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 11 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 12 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.25

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

INSPEKTORAT

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|-------------|------------------------------|-------|---------------|
| 1 | INSPEKTORAT | PIMPINAN TINGGI | 14 | Rp 13,837,281 |
| 2 | INSPEKTORAT | ADMINISTRASI - Administrator | 12 | Rp 6,569,870 |
| 3 | INSPEKTORAT | ADMINISTRASI - Administrator | 11 | Rp 6,188,610 |
| 4 | INSPEKTORAT | FUNGSIONAL | 11 | Rp 4,371,727 |
| 5 | INSPEKTORAT | ADMINISTRASI - Pengawas | 9 | Rp 3,140,964 |
| 6 | INSPEKTORAT | FUNGSIONAL | 9 | Rp 3,406,024 |
| 7 | INSPEKTORAT | FUNGSIONAL | 8 | Rp 3,124,577 |
| 8 | INSPEKTORAT | ADMINISTRASI - Pelaksana | 7 | Rp 1,697,724 |
| 9 | INSPEKTORAT | FUNGSIONAL | 7 | Rp 2,520,133 |
| 10 | INSPEKTORAT | ADMINISTRASI - Pelaksana | 6 | Rp 1,577,864 |
| 11 | INSPEKTORAT | ADMINISTRASI - Pelaksana | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO,



ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.26

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN SIPATANA

| NO | UNIT KERJA | SUB UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|--------------------|---------------------------|------------------------------|-------|--------------|
| 1 | KECAMATAN SIPATANA | KECAMATAN SIPATANA | PIMPINAN TINGGI | 12 | Rp 7,853,638 |
| 2 | KECAMATAN SIPATANA | KECAMATAN SIPATANA | ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR | 11 | Rp 3,514,663 |
| 3 | KECAMATAN SIPATANA | KECAMATAN SIPATANA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 2,791,968 |
| 4 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN BULOTADAA TIMUR | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 5 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN BULOTADAA BARAT | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 6 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN TANGGIKIKI | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 7 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN TAPA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 8 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN MOLOSIPAT U | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 9 | KECAMATAN SIPATANA | KECAMATAN SIPATANA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 3,028,582 |
| 10 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN BULOTADAA TIMUR | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 11 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN BULOTADAA BARAT | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 12 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN TANGGIKIKI | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 13 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN TAPA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 14 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN MOLOSIPAT U | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 15 | KECAMATAN SIPATANA | KECAMATAN SIPATANA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 7 | Rp 1,697,724 |
| 16 | KECAMATAN SIPATANA | KECAMATAN SIPATANA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 17 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN BULOTADAA TIMUR | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 18 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN BULOTADAA BARAT | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 19 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN TANGGIKIKI | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 20 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN TAPA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 21 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN MOLOSIPAT U | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 22 | KECAMATAN SIPATANA | KECAMATAN SIPATANA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 23 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN BULOTADAA TIMUR | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 24 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN BULOTADAA BARAT | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 25 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN TANGGIKIKI | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 26 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN TAPA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 27 | KECAMATAN SIPATANA | KELURAHAN MOLOSIPAT U | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.27

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN HULONTHALANGI

| NO | UNIT KERJA | SUB UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------|--------------|
| 1 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KECAMATAN HULONTHALANGI | PIMPINAN TINGGI | 12 | Rp 7,853,638 |
| 2 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KECAMATAN HULONTHALANGI | ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR | 11 | Rp 3,514,663 |
| 3 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KECAMATAN HULONTHALANGI | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 2,791,968 |
| 4 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN SIENDENG | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 5 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN TENDA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 6 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN POHE | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 7 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN TANJUNG KRAMAT | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 8 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN DONGGALA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 9 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KECAMATAN HULONTHALANGI | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 3,028,582 |
| 10 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN SIENDENG | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 11 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN TENDA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 12 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN POHE | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 13 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN TANJUNG KRAMAT | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 14 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN DONGGALA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 15 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KECAMATAN HULONTHALANGI | ADMINISTRAS - PELAKSANA | 7 | Rp 1,697,724 |
| 16 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KECAMATAN HULONTHALANGI | ADMINISTRAS - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 17 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN SIENDENG | ADMINISTRAS - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 18 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN TENDA | ADMINISTRAS - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 19 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN POHE | ADMINISTRAS - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 20 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN TANJUNG KRAMAT | ADMINISTRAS - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 21 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN DONGGALA | ADMINISTRAS - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 22 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KECAMATAN HULONTHALANGI | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 23 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN SIENDENG | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |

| | | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------|
| 24 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN TENDA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 25 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN POHE | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 26 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN TANJUNG KRAMAT | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 27 | KECAMATAN HULONTHALANGI | KELURAHAN DONGGALA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.28

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN DUNGINGI

| NO | UNIT KERJA | SUB UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|--------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|--------------|
| 1 | KECAMATAN DUNGINGI | KECAMATAN DUNGINGI | PIMPINAN TINGGI | 12 | Rp 7,853,638 |
| 2 | KECAMATAN DUNGINGI | KECAMATAN DUNGINGI | ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR | 11 | Rp 3,514,663 |
| 3 | KECAMATAN DUNGINGI | KECAMATAN DUNGINGI | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 2,791,968 |
| 4 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN LIBUO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 5 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN HUANGOBOTU | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 6 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN TULADENGGI | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 7 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN TOMULOBUTAO SELATAN | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 8 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN TOMULOBUTAO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 9 | KECAMATAN DUNGINGI | KECAMATAN DUNGINGI | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 3,028,582 |
| 10 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN LIBUO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 11 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN HUANGOBOTU | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 12 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN TULADENGGI | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 13 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN TOMULOBUTAO SELATAN | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 14 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN TOMULOBUTAO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 15 | KECAMATAN DUNGINGI | KECAMATAN DUNGINGI | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 7 | Rp 1,697,724 |
| 16 | KECAMATAN DUNGINGI | KECAMATAN DUNGINGI | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 17 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN LIBUO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 18 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN HUANGOBOTU | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 19 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN TULADENGGI | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 20 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN TOMULOBUTAO SELATAN | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 21 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN TOMULOBUTAO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 22 | KECAMATAN DUNGINGI | KECAMATAN DUNGINGI | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 23 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN LIBUO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 24 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN HUANGOBOTU | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |

| | | | | | |
|----|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--------------|
| 25 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN TULADENGGI | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 26 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN TOMULOBUTAO SELATAN | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 27 | KECAMATAN DUNGINGI | KELURAHAN TOMULOBUTAO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |


WALI KOTA GORONTALO,
ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.29

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG


TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN KOTA SELATAN

| NO | UNIT KERJA | SUB UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|------------------------|------------------------|------------------------------|-------|--------------|
| 1 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KECAMATAN KOTA SELATAN | PIMPINAN TINGGI | 12 | Rp 7,853,638 |
| 2 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KECAMATAN KOTA SELATAN | ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR | 11 | Rp 3,514,663 |
| 3 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KECAMATAN KOTA SELATAN | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 2,791,968 |
| 4 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN LIMBA U I | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 5 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN LIMBA U II | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 6 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN BIAWAO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 7 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN BIAWU | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 8 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN LIMBA B | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 9 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KECAMATAN KOTA SELATAN | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 3,028,582 |
| 10 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN LIMBA U I | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 11 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN LIMBA U II | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 12 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN BIAWAO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 13 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN BIAWU | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 14 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN LIMBA B | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 15 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KECAMATAN KOTA SELATAN | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 7 | Rp 1,697,724 |
| 16 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KECAMATAN KOTA SELATAN | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 17 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN LIMBA U I | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 18 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN LIMBA U II | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 19 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN BIAWAO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 20 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN BIAWU | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 21 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN LIMBA B | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 22 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KECAMATAN KOTA SELATAN | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 23 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN LIMBA U I | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 24 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN LIMBA U II | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |

| | | | | | |
|----|------------------------|-------------------|--------------------------|---|--------------|
| 25 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN BIAWAO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 26 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN BIAWU | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 27 | KECAMATAN KOTA SELATAN | KELURAHAN LIMBA B | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO,



ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.30
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
 TAMEAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN DUMBO RAYA

| NO | UNIT KERJA | SUB UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------|--------------|
| 1 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KECAMATAN DUMBO RAYA | PIMPINAN TINGGI | 12 | Rp 7,853,638 |
| 2 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KECAMATAN DUMBO RAYA | ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR | 11 | Rp 3,514,663 |
| 3 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KECAMATAN DUMBO RAYA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 2,791,968 |
| 4 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KELURAHAN LEATO SELATAN | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 5 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KELURAHAN LEATO UTARA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 6 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KELURAHAN BUGIS | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 7 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KELURAHAN BOTU | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 8 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KELURAHAN TALUMOLO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 9 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KECAMATAN DUMBO RAYA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 3,028,582 |
| 10 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KELURAHAN LEATO SELATAN | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 11 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KELURAHAN LEATO UTARA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 12 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KELURAHAN BUGIS | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 13 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KELURAHAN BOTU | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 14 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KELURAHAN TALUMOLO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 15 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KECAMATAN DUMBO RAYA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 7 | Rp 1,697,724 |
| 16 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KECAMATAN DUMBO RAYA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 17 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KECAMATAN DUMBO RAYA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 18 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KELURAHAN LEATO SELATAN | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 19 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KELURAHAN LEATO UTARA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 20 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KELURAHAN BUGIS | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 21 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KELURAHAN BOTU | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 22 | KECAMATAN DUMBO RAYA | KELURAHAN TALUMOLO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO

 ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.31
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN KOTA TIMUR

| NO | UNIT KERJA | SUB UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|--------------|
| 1 | KECAMATAN KOTA T MUR | KECAMATAN KOTA TIMUR | PIMPINAN TINGGI | 12 | Rp 7,853,638 |
| 2 | KECAMATAN KOTA T MUR | KECAMATAN KOTA TIMUR | ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR | 11 | Rp 3,514,663 |
| 3 | KECAMATAN KOTA T MUR | KECAMATAN KOTA TIMUR | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 2,791,968 |
| 4 | KECAMATAN KOTA T MUR | KELURAHAN MOODU | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 5 | KECAMATAN KOTA T MUR | KELURAHAN TAMALATE | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 6 | KECAMATAN KOTA T MUR | KELURAHAN PADEBUOLO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 7 | KECAMATAN KOTA T MUR | KELURAHAN IPILO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 8 | KECAMATAN KOTA T MUR | KELURAHAN HELEDULAA SELATAN | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 9 | KECAMATAN KOTA T MUR | KELURAHAN HELEDULAA UTARA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 10 | KECAMATAN KOTA T MUR | KECAMATAN KOTA TIMUR | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 3,028,582 |
| 11 | KECAMATAN KOTA T MUR | KELURAHAN MOODU | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 12 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN TAMALATE | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 13 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN PADEBUOLO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 14 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN IPILO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 15 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN HELEDULAA SELATAN | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 16 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN HELEDULAA UTARA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 17 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KECAMATAN KOTA TIMUR | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 7 | Rp 1,697,724 |
| 18 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KECAMATAN KOTA TIMUR | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 19 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN MOODU | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 20 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN TAMALATE | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 21 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN PADEBUOLO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 22 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN IPILO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 23 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN HELEDULAA SELATAN | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 24 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN HELEDULAA UTARA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 25 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KECAMATAN KOTA TIMUR | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |

| | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|--------------|
| 26 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN MOODU | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 27 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN TAMALATE | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 28 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN PADEBUOLO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 29 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN IPILO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 30 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN HELEDULAA SELATAN | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 31 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KELURAHAN HELEDULAA UTARA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 32 | KECAMATAN KOTA TIMUR | KECAMATAN KOTA TIMUR | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 3 | Rp 1,211,018 |


WALI KOTA GORONTALO
ADNAN DAMBEA

LAMPIRAN I.32

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN KOTA TENGAH

| NO | UNIT KERJA | SUB UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-------|--------------|
| 1 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KECAMATAN KOTA TENGAH | PIMPINAN TINGGI | 12 | Rp 7,853,638 |
| 2 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KECAMATAN KOTA TENGAH | ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR | 11 | Rp 3,514,663 |
| 3 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KECAMATAN KOTA TENGAH | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 2,791,968 |
| 4 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN PAGUYAMAN | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 5 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN PULUBALA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 6 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN LILUWO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 7 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN DULALOWO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 8 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN DULALOWO TIMUR | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 9 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN WUMIALO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 10 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KECAMATAN KOTA TENGAH | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 3,028,582 |
| 11 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN PAGUYAMAN | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 12 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN PULUBALA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 13 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN LILUWO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 14 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN DULALOWO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 15 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN DULALOWO TIMUR | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 16 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN WUMIALO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 17 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KECAMATAN KOTA TENGAH | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 7 | Rp 1,697,724 |
| 18 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KECAMATAN KOTA TENGAH | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 19 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KECAMATAN KOTA TENGAH | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 20 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN PAGUYAMAN | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 21 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN PULUBALA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 22 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN LILUWO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 23 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN DULALOWO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 24 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN DULALOWO TIMUR | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 25 | KECAMATAN KOTA TENGAH | KELURAHAN WUMIALO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO




ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.33
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN KOTA UTARA

| NO | UNIT KERJA | SUB UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|----|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------|--------------|
| 1 | KECAMATAN KOTA UTARA | KECAMATAN KOTA UTARA | PIMPINAN TINGGI | 12 | Rp 7,853,638 |
| 2 | KECAMATAN KOTA UTARA | KECAMATAN KOTA UTARA | ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR | 11 | Rp 3,514,663 |
| 3 | KECAMATAN KOTA UTARA | KECAMATAN KOTA UTARA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 2,791,968 |
| 4 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN DULOMO UTARA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 5 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN DULOMO SELATAN | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 6 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN DEMBE II | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 7 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN DEMBE JAYA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 8 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN WONGKADITI TIMUR | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 9 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN WONGKADITI BARAT | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 10 | KECAMATAN KOTA UTARA | KECAMATAN KOTA UTARA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 3,028,582 |
| 11 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN DULOMO UTARA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 12 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN DULOMO SELATAN | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 13 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN DEMBE II | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 14 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN DEMBE JAYA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 15 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN WONGKADITI TIMUR | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 16 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN WONGKADITI BARAT | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 17 | KECAMATAN KOTA UTARA | KECAMATAN KOTA UTARA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 7 | Rp 1,697,724 |
| 18 | KECAMATAN KOTA UTARA | KECAMATAN KOTA UTARA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 19 | KECAMATAN KOTA UTARA | KECAMATAN KOTA UTARA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 20 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN DULOMO UTARA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 21 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN DULOMO SELATAN | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 22 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN DEMBE II | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 23 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN DEMBE JAYA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 24 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN WONGKADITI TIMUR | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 25 | KECAMATAN KOTA UTARA | KELURAHAN WONGKADITI BARAT | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO

 ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN I.34

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

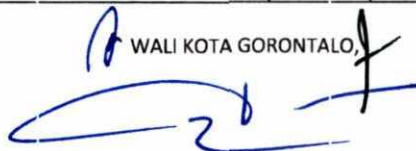
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN KOTA BARAT

| NO | UNIT KERJA | SUB UNIT KERJA | JABATAN | KELAS | HARGA TPP |
|-----|----------------------|-----------------------|------------------------------|-------|--------------|
| 1. | KECAMATAN KOTA BARAT | KECAMATAN KOTA BARAT | PIMPINAN TINGGI | 12 | Rp 7,853,638 |
| 2. | KECAMATAN KOTA BARAT | KECAMATAN KOTA BARAT | ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR | 11 | Rp 3,514,663 |
| 3. | KECAMATAN KOTA BARAT | KECAMATAN KOTA BARAT | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 2,791,968 |
| 4. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN DEMBE I | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 5. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN LEKOBALO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 6. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN PILOLODAA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 7. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN BULIIDE | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 8. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN TENILO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 9. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN MOLOSIFAT W | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 10. | KECAMATAN KOTA BARAT | KECAMATAN BULADU | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 9 | Rp 3,476,707 |
| 11. | KECAMATAN KOTA BARAT | KECAMATAN KOTA BARAT | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 3,028,582 |
| 12. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN DEMBE I | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 13. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN LEKOBALO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 14. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN PILOLODAA | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 15. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN BULIIDE | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 16. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN TENILO | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 17. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN MOLOSIFAT W | ADMINISTRASI - PENGAWAS | 8 | Rp 2,503,213 |
| 18. | KECAMATAN KOTA BARAT | KECAMATAN BULADU | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 8 | Rp 2,503,213 |
| 19. | KECAMATAN KOTA BARAT | KECAMATAN KOTA BARAT | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 7 | Rp 1,697,724 |
| 20. | KECAMATAN KOTA BARAT | KECAMATAN KOTA BARAT | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 21. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN DEMBE I | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 22. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN LEKOBALO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 23. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN PILOLODAA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 24. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN BULIIDE | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 25. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN TENILO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 26. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN MOLOSIFAT W | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 27. | KECAMATAN KOTA BARAT | KECAMATAN BULADU | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 6 | Rp 1,577,864 |
| 28. | KECAMATAN KOTA BARAT | KECAMATAN KOTA BARAT | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 29. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN DEMBE I | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 30. | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN LEKOBALO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |

| | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------|--------------------------|---|--------------|
| 31 | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN PILOLODAA | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 32 | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN BULIIDE | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 33 | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN TENILO | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 34 | KECAMATAN KOTA BARAT | KELURAHAN MOLOSIFAT W | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |
| 35 | KECAMATAN KOTA BARAT | KECAMATAN BULADU | ADMINISTRASI - PELAKSANA | 5 | Rp 1,533,693 |

WALI KOTA GORONTALO,



ADHAN DAMBEA